



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERCEPATAN PENYALURAN BANSOS KENAikan BBM

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai kompensasi dari dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sejak ditetapkan 3 September 2022. Presiden bahkan lebih menekankan lagi agar proses penyalurannya dipermudah dan dipastikan tepat sasaran. Menurut Presiden, sampai saat ini proses pembagian sudah berjalan dengan baik, mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah telah memutuskan dan menyalurkan tambahan bantuan sosial sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 24,17 triliun nantinya diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan tersebut akan diberikan dalam tiga bentuk yaitu BLT, bantuan untuk pekerja berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan, dan subsidi transportasi.

Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri menargetkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) minimal 90 persen dari target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 18.585.000 orang dari jumlah. Besaran uang yang diterima yakni Rp 300.000 yang diberikan sebanyak dua kali pencairan yaitu pada bulan September dan Desember 2022, sehingga total yang akan diterima masing-masing KPM adalah sebesar Rp 600.000.

Sementara itu Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga telah menyalurkan BLT BBM BSU atau biasa disebut subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu tahap pertama kepada 4.112.052 pekerja yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Sama halnya dengan BLT kepada rumah tangga miskin, BLT BBM BSU atau subsidi gaji ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kenaikan harga.

Berdasarkan praktik di lapangan, khusus penyaluran BLT BBM Kemensos ini diberikan melalui tiga cara yaitu (1) masyarakat mengambil sendiri ke Kantor Pos terdekat; (2) dengan disalurkan ke lembaga pemerintahan setempat seperti RT/RW, kelurahan, dan kecamatan; dan (3) diberikan langsung ke rumah bagi penerima yang kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk datang ke Kantor Pos. Dengan memperhatikan besarnya dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga barang maka anggaran kompensasi kenaikan harga BBM sebenarnya masih terlalu kecil. Dampak kenaikan tersebut jelas tidak hanya mengenai masyarakat miskin namun juga masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan dan juga rentan miskin. Pemerintah terkesan hanya berfokus terhadap bantuan kelompok orang miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah saja. Padahal kelompok kelas menengah rentan yang jumlahnya sekitar 115 juta orang juga perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Kelompok ini jelas akan menerima dampak inflasi namun mereka tidak mendapat bantuan.

Sementara itu dari sisi momentum, pencairan pemberian BLT BBM harusnya bersamaan dengan keputusan kenaikan BBM, yang berarti jika kenaikan harga BBM terjadi pada awal September, maka setidaknya tanggal yang ideal untuk bansos cair seluruhnya ketika Agustus akhir atau bersamaan dengan keputusan kenaikan harga BBM.

Atensi DPR

Meskipun Pemerintah telah menggulirkan tiga bantuan sosial untuk menekan dampak dari keputusan menaikkan harga BBM, kebijakan ini tetap akan melahirkan beragam dampak pada masyarakat. Dampak tersebut antara lain kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok, meningkatnya jumlah orang miskin, inflasi, stagflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia, dan kenaikan ongkos angkutan. Penyaluran bantuan sosial sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM tersebut perlu memperoleh perhatian yang serius DPR RI karena berdasarkan pengalaman selama ini program-program bantuan yang digulirkan pemerintah selalu melahirkan masalah utamanya pada data penerima bantuan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan selama ini acap kali kurang tepat sasaran karena data penerima yang kurang valid. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Persoalan data sejatinya merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung selesai. Data yang valid akan meminimalisir kekurangtepatan sasaran penerima bantuan.

Sumber

kompas.com, 16 September 2022;
republika.co.id, 17 September 2022;
tempo.co, 18 September 2022.

Minggu ke-3 September
(15 s.d. 21 September 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022